

Peningkatan Produksi Padi Melalui Penguatan Kelembagaan Perbenihan Padi Di Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung

Increased Rice Production Through Strengthening Rice Seedling Institutions in Lubuk Pandan Nagari, District 2 X 11 Enam Lingkung

Ivonne Ayesha

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Ekasakti

E-mail. drivonneayasha@gmail.com

Naskah Masuk : 10-11-2017

Naskah Diterima : 18-12-2018

Naskah Disetujui : 04-03-2018

Abstract

This study aims to identify the institutions that play a role in the procurement of rice seeds, describe the role of each institution, and develop policy recommendations for institutional strengthening of rice seed. The research was conducted in Nagari Lubuk Pandan, District 2x11 Six Lingkung, Padang Pariaman District, West Sumatera Province. The respondents' farmers were deliberately determined by 35 people based on the guidance of Wali Nagari and community leaders. Data were analyzed descriptively and presented in table and diagram. The results showed that 1) Institutional of rice seed in Nagari Lubuk Pandan consist of formal and informal institution. The formal institutions are Gapoktan "Lubuk Pandan Sejahtera" and Saprodi Kiosk. Informal institutions are groups of other farmers who lend rice seeds. More than half of the farmers of the respondents obtained rice seed from other farmers, because it was more efficient, 2) Gapoktan "Lubuk Pandan Sejahtera", played a role in channeling seeds to its members if there is a seed assistance program from the government. Saprodi Kiosk provides high quality rice seeds at all times, but very few farmers can afford them, and 3) Farmers' structural weaknesses (low education and knowledge, narrow land, technological mastery and low group manageability), cause they are unable to integrate the provision of seed input with the farm, so that production tends to decrease. This condition needs to be improved through institutional strengthening and empowerment of farmers through concepts acceptable to farmers.

Keywords: production, rice. institutional, seed

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelembagaan yang berperan dalam pengadaan benih padi, mendeskripsikan peran masing-masing lembaga, dan menyusun rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan perbenihan padi. Penelitian dilakukan di Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Petani responden ditetapkan secara sengaja sebanyak 35 orang berdasarkan petunjuk Wali Nagari dan pemuka masyarakat. Data dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan diagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kelembagaan perbenihan padi di Nagari Lubuk Pandan terdiri dari kelembagaan formal dan informal. Kelembagaan formal berupa Gapoktan "Lubuk Pandan Sejahtera" dan Kios Saprodi. Kelembagaan informal berupa kelompok petani lain yang meminjamkan benih padi. Lebih dari setengah petani responden memperoleh benih padi dari petani lain, karena dirasa lebih efisien, 2) Gapoktan "Lubuk Pandan Sejahtera", berperan dalam menyalurkan benih ke anggotanya jika ada program bantuan benih dari pemerintah. Kios Saprodi menyediakan benih padi bermutu setiap saat, namun sedikit sekali petani yang mampu membelinya, dan 3) Kelemahan struktural petani (rendahnya pendidikan dan pengetahuan, lahan garapan sempit, penguasaan teknologi dan kemampuan mengelola kelompok rendah), menyebabkan mereka tidak mampu mengintegrasikan penyediaan input benih dengan usahatani, sehingga produksi cenderung menurun. Kondisi ini perlu diperbaiki melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani melalui konsep-konsep yang dapat diterima petani.

Kata kunci: produksi, padi. kelembagaan, perbenihan

PENDAHULUAN

Tingkat produksi dan kualitas produk pertanian, sangat ditentukan oleh

input benih yang digunakan. Ketidaktepatan penggunaan benih berdampak pada penurunan hasil dan

kualitas produk. Menurut Ayesha, Soetiarso, Karmana dan Karyadi (2017), bahwa benih unggul dapat mempengaruhi produktivitas, mutu hasil dan sifat ekonomis produk tanaman pangan secara agregat. Pemilihan jenis, varietas, mutu, kualitas, waktu, ketersediaan dan kesesuaian benih dengan lokasi dan agroekosistem sangat menentukan tingkat produksi.

Sampai saat ini, tidak banyak petani yang menggunakan benih bermutu, termasuk petani padi di Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingsung, Kabupaten Pariaman. Kondisi ini berdampak pada rendahnya produksi padi di wilayah ini. Hasil padi yang bisa dicapai hanya sekitar 4,5 ton per hektar. Tingkat produksi ini jauh lebih rendah dari produksi padai Sumatera Barat yang mencapai angka di atas 5 ton per hektar (BPS Sumatera Barat, 2016).

Beberapa hal yang menyebabkan petani tidak menggunakan benih padi bermutu adalah (1) keterbatasan modal usaha, harga benih bermutu dinilai lebih mahal, sehingga memberatkan petani, (2) sulit memperoleh benih bermutu, karena kurangnya informasi yang diterima oleh petani, (3) ketidak-mengertian petani akan manfaat dan penggunaan benih bermutu karena kurangnya penguasaan teknologi. Adanya kebijakan dan program

pemerintah yang mengatas-namakan swasembada pangan guna mencukupi konsumsi pangan bangsa, telah mempersempit ruang gerak petani untuk menguasai benih dan justru semakin membuat petani terjebak ke dalam pusaran arus pasar yang belum banyak dipahami oleh petani (Prihandono, 2007).

Kondisi seperti digambarkan di atas, juga ditemui pada petani padi di Nagari Lubuk Pandan. Petani lebih memilih menggunakan benih hasil panen sebelumnya secara berulang-ulang atau memperolehnya dari hasil panen sesama petani. Kualitas benih yang digunakan ini jelas belum teruji secara laboratorium. Indikator kualitas benih yang digunakan petani tersebut hanya dengan melihat fisik benih dan padi yang dihasilkan oleh benih tersebut pada panen sebelumnya.

Tersediaya benih padi bermutu, tidak terlepas dari peran kelembagaan sebagai elemen penting dalam upaya. Dalam konteks pengadaan dan distribusi benih, tidak terlepas dari peran kelembagaan sebagai elemen penting dalam upaya peningkatan produktifitas usahatani dan perbaikan kemampuan produksi petani. Peran kelembagaan ini sering terlupakan karena peran nyatanya dalam proses produksi berada dalam posisi lemah. Selama ini upaya peningkatan produksi pertanian senantiasa

dikaitkan dengan penerapan dan jenis teknologi yang dinilai sesuai dengan tujuan produksi, padahal peran kelembagaan dan lembaga pertanian dalam proses penyebaran dan adopsi-inovasi teknologi pertanian masih sangat kuat. Lebih jauh lagi pada hirarki sosial tertentu, proses penyaluran informasi dan teknologi tidak dapat dilepaskan dari eksistensi dan peran kelembagaan serta kondisi sosial tertentu (Ayesha, dkk, 2017).

Kelembagaan menurut Frankel (1953) dalam Hunter (1969) adalah saluran yang digunakan untuk aliran berbagai aktivitas yang nyata dari masyarakat. Dasar pendekatan terhadap kelembagaan ini adalah: 1) Kebutuhan untuk institusi baru bagi masyarakat perdesaan yang terisolasi adalah melalui kontak atau jalinan yang tumbuh dan bisa dipercaya dengan masyarakat luarnya, termasuk pasar, pengetahuan teknis, maupun dukungan sosial politik; 2) Konsep pentahapan: a. masyarakat dengan institusi dan sikap yang masih tradisional, b. transisi, dengan mengawali institusi dan teknik modern tetapi masih tetap menyandarkan pada kerangka kerja tradisional, c. ekonomi pasar terbuka dan masyarakat dengan politik terbuka terhadap institusi yang mereka butuhkan. Penyesuaian dalam upaya-upayanya akan

menciptakan kelembagaan lokal baru yang akan menjelaskan keterkaitan dengan pertanian; 3) Situasi kekuasaan di tingkat perdesaan berpengaruh terhadap pertumbuhan kelembagaan modern, baik melalui kegiatan kelompok maupun koperasi, serta melalui pengembangan kekuatan politik dalam ekonomi perdesaan dapat menyeimbangkan struktur kekuasaan tradisional; 4) Perubahan teknis dalam kelembagaan akan memfasilitasi atau memerlukan perubahan kelembagaan secara keseluruhan (Hunter, 1969).

Fungsi lembaga adalah menyediakan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat, meskipun dapat berubah. Bagi petani, lembaga memberikan pedoman dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari khususnya dalam bidang agribisnis. Berbagai norma yang hidup di masyarakat termasuk norma-norma pasar beserta seperangkat regulasi menjadi pertimbangan petani untuk bertindak sebagaimana petani memahaminya (kultural-kognitif) (Nuraini, Darwanto, Masyhuri, Jamhari, 2016.)

Berdasarkan fenomena tersebut, telah dilakukan penelitian tentang kelembagaan perbenihan padi di Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman,

Provinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian adalah 1) mengidentifikasi kelembagaan yang berperan dalam pengadaan benih padi, 2) mendeskripsikan peran masing-masing lembaga perbenihan padi, dan 3) menyusun rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan perbenihan padi sebagai upaya peningkatan produksi dan kualitas padi, khususnya di lokasi penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan penelitian berlangsung dari Bulan Maret sampai Juni 2016. Lokasi penelitian dan petani responden ditentukan secara *purposive* agar sesuai dengan focus penelitian dan dapat memperoleh informasi secara mendalam. Kriteria petani responden adalah petan padi sawah yang berada di Nagari Lubuk Pandan.

Penentuan petani responden dilakukan dengan bertanya kepada Wali Nagari Lubuk Pandan dan Ketua Gapoktan. Hasil diskusi dengan tokoh masyarakat ini diperoleh sebanyak 35 orang petani responden yang dipandang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Untuk memperkuat informasi, responden juga diambil dari tokoh masyarakat dan PPL. Responden petani dipilih sebanyak 35 orang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang berpedoman pada kuesioner. Hasil analisis data dideskripsikan dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan diagram.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Petani

Karakteristik petani dalam penelitian ini meliputi umur, pendidikan dan lamanya berusahatani. Secara lengkap, data karakteristik petani responden ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Petani

Umur	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Tanggungjawab Keluarga (orang)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
25-35	0	0	SD	21	60	1-2	13	37
36-45	9	26	SMP	10	29	3-4	18	51
46-55	14	40	SM	4	11	5-6	4	11
>55	12	34	Sarjana	0	0	>6	0	0
Total	35	100		35	100		35	100

Sumber: Data sekunder diolah

Petani padi di Nagari Lubuk Pandan didominasi oleh usia antara 46-55 tahun dengan pendidikan pada umumnya

Sekolah Dasar. Jumlah tanggungan keluarga petani padi di wilayah ini pada umumnya antara 2-3 orang.

Berdasarkan karakteristik petani ini diketahui bahwa pada umumnya petani padi di Nagari Lubuk Pandan masih tergolong produktif, namun tingkat pendidikan mereka masih rendah. Kondisi ini mengakibatkan usahatani yang mereka jalani masih secara tradisional. Inovasi dalam usahatani sangat rendah.

Karakteristik Usahatani

Karakteristik usahatani yang dinilai dalam penelitian ini adalah luas lahan garapan petani dan lamanya pengalaman berusahatani. Masing-masing karakteristik tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Usahatani

Luas lahan garapan	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Pengalaman berusahatani thn	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Status Kepemilikan lahan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
>0,25	0	0	< 10	1	3	Milik sendiri	21	60
0,25-0,50	21	60	10-20	16	46	Sewa	6	1
0,51-1,00	12	34	21-30	13	37	Bagi Hasil	8	23
>1,00	2	6	>30	5	14	Gadai	0	0
Total	35	100		35	100		35	100

Sumber: Data primer diolah

Karakteristik usahatani yang ditampilkan pada Tabel 2, memberikan informasi bahwa pada umumnya petani padi di Nagari Lubuk Pandan merupakan petani gurem, yaitu petani dengan luas lahan kurang dari atau sama dengan 0,5 ha, namun pengalaman berusahatani umumnya di atas 10 tahun. Kondisi yang lebih baik dari petani padi di wilayah ini adalah, lahan yang digarap pada umumnya milik sendiri, sehingga hasil panen padi menjadi milik petani.

Identifikasi Kelembagaan Perbenihan Padi

Padi merupakan komoditas penghasil beras yang sampai saat ini masih menjadi pangan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Kebutuhan

terhadap padi/beras akan cenderung meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Oleh sebab itu, peningkatan produksi padi senantiasa diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat dan mengurangi jumlah impor beras. Upaya ini terutama oleh pemerintah melalui berbagai program.

Kelembagaan perbenihan padi merupakan kelembagaan subsistem hulu pada sistem agribisnis padi. Kelembagaan ini perbenihan padi ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya input benih yang dibutuhkan petani untuk usahatani padi.

Kelembagaan penyedia benih padi di Nagari Lubuk Pandan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu

kelembagaan formal dan informal. Kelembagaan formal yang menyediakan benih padi bagi petani padi di Nagari Lubuk Pandan adalah 1) Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) “Lubuk Pandan Sejahtera”, 2) kios saprodi (kios sarana produksi). Kelembagaan informal yang menyediakan benih bagi petani di wilayah ini hanya satu, yaitu petani padi lain, baik yang ada hubungan keluarga maupun tidak.

Deskripsi Peran Kelembagaan Perbenihan Padi

Kelembagaan formal penyedia benih padi yang paling dekat dengan petani adalah Gapoktan “Lubuk Pandan Sejahtera”. Gapoktan ini merupakan gabungan dari 17 (tujuh belas) kelompok tani yang terdapat di Nagari Lubuk Pandan. Gapoktan ini diresmikan pada Tahun 2009, diketuai oleh Bapak Afrizal Yusuf. Dengan demikian, maka semua anggota kelompok-kelompok tani tersebut, otomatis merupakan anggota Gapoktan.

Peran Gapoktan ini dalam menyediakan benih padi untuk anggotanya masih sangat terbatas. Gapoktan dapat menyediakan benih padi untuk para anggotanya jika ada program bantuan benih dari pemerintah. Artinya jika tidak ada program tersebut, maka Gapoktan tidak memerankan diri sebagai

penyedia benih padi bagi anggotanya. Ditemui beberapa hal yang menyebabkan Gapoktan tidak dapat berperan aktif dalam menyediakan benih padi, yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan anggota Gapoktan tentang pengadaan benih padi bagi anggotanya.
2. Tidak ada anggota yang mampu melahirkan inovasi untuk memajukan lembaga tersebut.
3. Tidak ada bimbingan dari pihak-pihak berkomponen terkait dengan peran Gapoktan dalam menyediakan benih padi.
4. Kurangnya interaksi anggota Gapoktan dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan benih, seperti penyalur benih padi.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak berperannya Gapoktan dalam menyediakan benih padi bagi anggotanya tersebut, dapat dikatakan berkaitan dengan kurangnya motivasi, kapasitas, dan kurangnya kinerja kelembagaan. Menurut Mackay et al. dalam Syahyuti (2004), ada empat dimensi untuk mempelajari suatu kelembagaan (institutional assesment), yakni: i) kondisi lingkungan eksternal (*the environment*), ii) motivasi kelembagaan (*institutional motivation*), iii) kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*), dan

iv) kinerja kelembagaan (*institutional performance*).

Berdasarkan fakta tentang Gapoktan “Lubuk Pandan Sejahtera” tersebut, maka anggota tidak meletakkan lembaga ini sebagai penyedia benih padi utama dalam usahatani padinya. Hal ini karena program bantuan benih oleh pemerintah tidak selalu ada, bahkan sering tidak ada. Petani tidak mungkin menunggu benih dari Gapoktan setiap kali musim tanam. Kondisi ini menyebabkan berperannya kelembagaan lain untuk menyediakan benih padi, yaitu Kios Saprodi.

Menurut Syaiful (2011) kios sarana produksi pertanian (Kios Saprodi) adalah suatu unit bangunan usaha yang digunakan untuk menyediakan dan menyalurkan sarana produksi pertanian seperti benih/bibit, pupuk, pestisida/herbisida dan sarana pertanian lainnya, untuk mendukung peningkatan produksi dalam upaya penyediaan pangan dan pengembangan agribisnis.

Kios Saprodi hampir selalu menyediakan benih padi, tetapi benih ini bukan berupa bantuan, tetapi dijual kepada petani yang membutuhkan. Kios Saprodi yang terdapat di Nagari Lubuk Pandan hanya ada satu, yaitu Kios Saprodi Milik Ibu Emi. Kios ini terdapat di Korong Balai Satu.

Benih yang dijual di Kios Saprodi pada umumnya merupakan benih bermutu dengan berbagai merk. Harga benih padi ini berkisar antara Rp.15000 sampai Rp.18.000 per kg. Harga benih tergantung pada kualitas benih itu sendiri. Kebutuhan benih padi per hektar direkomendasikan sebanyak 25 kg benih dengan jarak tanam 25 x 25.

Petani padi di Nagari Lubuk Pandan, pada umumnya hanya menggunakan benih padi sebanyak 20 kg per ha dengan jarak tanam antara 20 x 20 cm sampai 22 x 22 cm. Apabila petani menggarap lahan sawah seluas 0,5 ha, maka kebutuhan benih sekitar 10 kg. Jika petani menggunakan benih dengan harga Rp.15.000 per kg, maka dibutuhkan uang sebanyak 10 kg x Rp.15.000, yaitu Rp.150.000. Apabila petani menggunakan benih dengan harga Rp.18.000 per kg, maka uang yang dibutuhkan untuk membeli input ini adalah sejumlah Rp.180.000.

Uang sejumlah Rp.150.000 atau Rp.180.000 untuk memenuhi kebutuhan benih lahan sawah seluas 0,5 ha, terasa cukup berat bagi petani. Pembelian benih padi di Kios Saprodi ini dilakukan secara tunai. Hal ini berarti bahwa petani padi harus memiliki uang tunai di awal. Oleh sebab itu tidak semua petani membeli benih padi bermutu ini di Kios Saprodi.

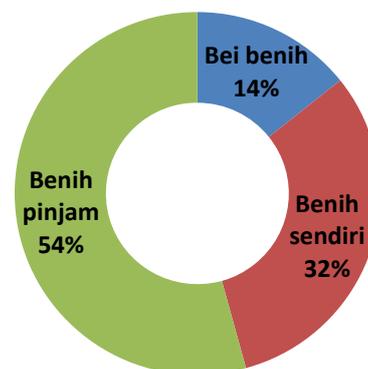
Menurut Ayesha (2014), kemampuan petani untuk membeli benih padi bergantung pada ketersediaan uang dalam rumah tangga petani. Apabila ketersediaan uang dalam rumah tangga cukup, maka petani akan membeli benih. Sebaliknya, jika ketersediaan uang dalam rumah tangga tidak cukup, petani tidak akan membeli benih.

Penyediaan input benih yang murah dalam jumlah yang cukup merupakan bagian dari kebutuhan petani, namun hal ini sering terabaikan. Input benih yang dibutuhkan petani kebanyakan masih ditangani oleh pihak luar yang tidak mentolerir keterbatasan modal petani. Pihak luar yang menaangani perbenihan padi mengenaikan prinsip ekonomi yang ingin memperoleh keuntungan setinggi-tingginya.

Ketidakcukupan ketersediaan uang dalam rumah tangga, yang menyebabkan petani tidak bisa membeli benih bermutu di Kios Saprodi, merupakan alasan petani untuk menggunakan benih yang berasal dari hasil panen sebelumnya atau meminjamnya dari petani lain.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa petani lain yang menyediakan input benih tersebut dikelompokkan pada kelembagaan perbenihan padi informal. Meskipun lembaga informal tetap memiliki aturan main. Cara memperoleh

benih seperti ini yang paling banyak ditemui pada petani padi di Nagari Lubuk Pandan, seperti diperlihatkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Persentase Petani Padi Dalam Memperoleh Benih Padi

Lebih dari setengah petani responden memperoleh benih padi dengan cara meminjam benih dari petani lain, biasanya mereka masih punya hubungan kekerabatan atau tetangga dekat. Cara memperoleh benih seperti ini dirasakan paling efisien oleh petani padi di Nagari Lubuk Pandan. Mereka tidak perlu menyediakan uang tunai di awal untuk memperoleh benih. Meskipun ketersediaan uang dalam rumah tangga tidak cukup, namun petani padi ini tetap bisa memperoleh benih padi pada saat datang musim tanam.

Pinjam meminjam benih antar petani padi ini terjadi atas dasar kepercayaan. Tidak ada perjanjian tertulis, hanya kesepakatan antara petani peminjam dengan petani yang

meminjamkan benih padi. Benih yang dipinjam tersebut, biasanya telah diyakini hasil panennya baik menurut versi petani. Pengembalian pinjaman benih ini dilakukan pada saat panen dalam bentuk benih/padi pula.

Di sisi lain, benih padi dari hasil panen sebelumnya yang dipinjam petani ke petani lain tersebut, belum teruji mutunya. Kualitas benih padi hanya berdasarkan hasil panen sebelumnya. Sering hasil panen yang diperoleh lebih rendah dari hasil panen sebelumnya. Hal ini diduga telah terjadi penurunan kualitas benih, karena telah digunakan secara berulang-ulang.

Petani padi di Nagari Lubuk Pandan sebenarnya meyakini kualitas benih bermutu yang dijual di Kios Saprodi, namun mereka enggan membelinya karena harganya dianggap mahal. Untuk mengadakan benih bermutu secara mandiri, mereka tidak punya pengetahuan dan keterampilan. Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani tempat mereka bernaung juga belum berperan sebagai penyedia benih bermutu bagi mereka. Dengan kata lain, secara individu petani padi tidak mampu menyediakan input benih bermutu (subsistem hulu) dan mengintegrasikannya dengan usahatannya (subsistem usahatani).

Kondisi ini merupakan kelemahan struktural petani.

Berdasarkan fenomena petani padi di Nagari Lubuk Pandan, dirasa penting untuk melakukan pemberdayaan petani padi dan penguatan kelembagaan local yang berkembang di antara petani. Saleh et al. (2007) dalam Nuraini dkk (2016) mengatakan bahwa kelembagaan merupakan faktor penting dalam mengatur hubungan antar individu untuk penguasaan faktor produksi yang langka. Dalam hal ini sangat dibutuhkan intervensi pemerintah dan pihak-pihak berkompeten lainnya untuk melakukan pemberdayaan petani dan lembaga di lingkungannya.

Suradisastra (2008), mengatakan bahwa dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petanimerupakan bagian pranatasosial yang memfasilitasi interaksi sosial tau social interplay dalam suatu komunitas. Upaya pemberdayaan kelembagaan petani guna meningkatkan perhatian dan motivasi berusahatani akan lebih memberikan hasil bila memanfaatkan makna dan potensi 3 (tiga) kata kunci utama dalam konteks kelembagaan, yaitu: norma, perilaku serta kondisi dan hubungan sosial.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kelembagaan perbenihan padi di Nagari Lubuk Pandan terdiri dari kelembagaan formal dan informal. Kelembagaan formal berupa Gapoktan “Lubuk Pandan Sejahtera” dan Kios Saprodi. Kelembagaan informal berupa kelompok petani lain yang meminjamkan benih padi. Lebih dari setengah petani responden memperoleh benih padi dari petani lain, karena dirasa lebih efisien, dan tidak membutuhkan uang tunai di awal.
2. Gapoktan “Lubuk Pandan Sejahtera”, berperan dalam menyalurkan benih ke anggotanya jika ada program bantuan benih dari pemerintah. Kios Saprodi menyediakan benih padi bermutu setiap saat, namun sedikit sekali petani yang mampu membelinya, karena ketidaktersediaan uang yang cukup dalam rumah tangga.
3. Kelemahan struktural petani (rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan, lahan garapan sempit, penguasaan teknologi rendah, kemampuan mengelola kelompok rendah), menyebabkan mereka tidak mampu mengintegrasikan penyediaan input benih dengan usahatani, sehingga produksi cenderung menurun. Kondisi ini perlu diperbaiki

melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani melalui konsep-konsep yang dapat diterima petani.

Rekomendasi

Kelembagaan informal lebih memegang peran dalam penyediaan benih padi bagi petani, namun kualitas benih dari lembaga ini kualitasnya belum terjamin. Di sisi lain lembaga Gapoktan yang menaungi petani padi tidak memainkan perannya sebagai penyedia benih bermutu pada setiap kali dibutuhkan petani. Dibutuhkan intervensi pemerintah melalui kebijakan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani padi. Kelembagaan hendaknya mencakup semua aspek dan semua elemen masyarakat. Kebijakan tersebut harus mampu memfasilitasi kepentingan petani padi, kelompok tani, Gapoktan, perangkat desa, dan pemerintah. Salah satu metode penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani padi adalah pengetahuan dan menjembatani mereka dalam proses adopsi teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Ayesha, Ivonne. 2014. *Model Ekonomi Rumah Tangga Petani Penggarap: Suatu Analisis Menggunakan System Dynamics*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung (tidak dipublikasikan).

-----, Thomas Agoes
Soetiarso, Maman Haeruman

- Karmana dan Asih Kartasih Karyadi, 2017. *Kelembagaan Kemitraan Menunjang Peningkatan Pengadaan Dan Kelancaran Distribusi Benih Kentang Di Jawa Barat*. Unes Journal of Agricultural Sciencetech, Vol 1, Issue 2, Agustus 2017.
- Nuraini, Candra, Dwidjono Hadi Darwanto, Masyhuri, Jamhari. 2016. *Model Kelembagaan Pada Agribisnis Padi Organik Kabupaten Tasikmalaya*. Jurnal AGRARIS. Vol.2 No.1 Januari 2016.
- Prihandono, S. 2007. *Melestarikan Benih Lokal Melalui Forum Pengelola Pembenihan*. Majalah Salam. Edisi 20 September 2007.
- Suradisastra, Kedi. 2008. *Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 26, No. 2. Desember 2008: 82-91.
- Syaiful, Rahmat. 2011. <https://www.scribd.com/doc/72035766/> *Pengeran Dan Istilah Pertanian* 2011 di akses tgl 03-6-2016.
- Syahyuti. 2004. *Model Kelembagaan Penunjang Pengembangan Pertanian di Lahan Lebak: Aspek kelembagaan dan Aplikasinya dalam Pengembangan Pertanian*. Bogor: Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian

